



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 06 September 2017

Halaman: 13

► BANTUAN SISWA MISKIN

JPD Boleh untuk Bayar SPP

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja belum memiliki landasan hukum untuk menanggung biaya sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) untuk siswa SMA/SMK miskin atau pemegang kartu menuju sejahtera (KMS), karena kewenangan SMA dan SMK di bawah Pemda DIY. Namun demikian, Pemerintah Kota Jogja membolehkan bantuan jaminan pendidikan daerah (JPD) dimanfaatkan untuk membayar SPP.

Sebelum SMA dan SMK diambil alih provinsi, iuran SPP siswa pemegang KMS gratis. "Kami tidak akan mengeluarkan anggaran untuk membayar SPP karena tidak diperbolehkan, tapi jika siswa

memanfaatkan JPD untuk membayar SPP boleh-boleh saja," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Edi Hari Suasana, Selasa (5/9).

Edi mengatakan, secara bertahap pihaknya mulai mencairkan dana JPD untuk siswa SMA/SMK. Jaminan pendidikan ini tidak diberikan melalui sekolah, melainkan langsung kepada siswa untuk meringankan biaya sekolah. Pemanfaatan JPD untuk kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan.

Besaran JPD untuk masing-masing siswa sebesar Rp4,5 juta. Nilai JPD tersebut meningkat jika dibanding tahun lalu sebesar Rp3 juta per siswa per tahun. Kenaikan

nilai JPD ini diakui Edi, salah satu pertimbangannya karena siswa tidak lagi digratiskan dalam SPP setelah kewenangan SMA dan SMK ditarik ke Pemda DIY.

Edi tidak hafal berapa jumlah penerima JPD. Namun, anggaran keseluruhan JPD untuk siswa SMA/SMK pemegang KMS mencapai Rp33 miliar. Selain JPD untuk siswa SMA dan SMK, Dinas Pendidikan juga memberikan JPD untuk siswa SMP sebesar Rp3 juta per siswa per tahun dan Rp2,2 juta untuk siswa SD per tahun, serta TK Rp1 juta per siswa per tahun. "Proses pencairan JPD tidak ada persoalan sudah mulai dicairkan," ucap Edi. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005